

Judul : Benteng terakhir cegah TPPO, Bandara Soetta butuh penguatan keamanan
Tanggal : Minggu, 13 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Benteng Terakhir Cegah TPPO Bandara Soetta Butuh Penguatan Keamanan



Dewi Asmara

SENAYAN mendorong penguatan sistem pengawasan dan pelayanan keimigrasian dalam upaya mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPM), khususnya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Jakarta. Upaya penguatan dan pencegahan perlu dilakukan melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis data.

Wakil Ketua Komisi XIII DPR Dewi Asmara mengatakan, upaya pencegahan tidak cukup hanya dilakukan pada saat seseorang akan melakukan perjalanan ke luar negeri, tetapi dimulai sejak tahap awal hingga proses penegakan hukum. Karena itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi didorong untuk membangun sistem dan metodologi yang mutakhir dan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Caranya dengan menghubungkan berbagai data, mulai dari Desa Binaan Imigrasi, permohonan paspor yang terindikasi, hasil wawancara dan profiling, penundaan keberangkatan, informasi intelijen, data tiket dan daerah tujuan, hingga pengurusan visa yang dilakukan berulang kali.

Dewi menegaskan, pencegahan TPPO membutuhkan

sistem yang mampu membaca pola dan mendeteksi risiko sejak dini. "Jadi integrasi data menjadi sangat penting agar aparat dapat mengidentifikasi calon korban, perekrut, fasilitator, maupun jaringan yang terlibat," kata dia di Jakarta, Jumat (11/9/2026).

Sebelumnya, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta menunda keberangkatan sebanyak 1.019 calon penumpang berisiko terkait TPPO atau pekerja migran nonprosedural selama periode Januari hingga Agustus 2026. Sedangkan pada tahun 2025 sebanyak 1.903 WNI ditunda keberangkatannya. Sehingga, total sebanyak 2.922 calon penumpang yang dicegah berangkat di Imigrasi Soekarno-Hatta selama 2025 dan 2026.

Dewi melanjutkan, peningkatan integrasi dan analisis data penerbangan serta perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) penting dilakukan. Pertukaran informasi dengan operator penerbangan dan instansi terkait juga dinilai penting untuk memetakan pola perjalanan berisiko, memperkuat risiko profiling, serta meningkatkan deteksi dini terhadap potensi TPPO.

Selain itu, Dewi meminta pendekatan pencegahan berbasis masyarakat melalui penguatan Desa Binaan Imigrasi. Program tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sarana literasi keimigrasian, tetapi juga mampu memberikan edukasi mengenai modus dan risiko TPPO serta membangun kesadaran masyarakat agar tidak mudah menjadi korban. Apalagi Bandara Soekarno-Hatta merupakan benteng pertahanan terakhir dalam pencegahan TPPO. ■ TIF